4. PERIODE IV (2040 - 2045)
PEMANTAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN

Difokuskan pada keberlanjutan dan pemantapan capaian pembangunan yang terintegrasi. Pemantapan capaian pembangunan pembangunan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pengendalian ruang terbuka hijau, pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, dan kolaboratif, serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

6 SASARAN POKOK

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (17 IE)		INDIKATOR	TARGET	
				BASELINE 2025	TARGET 2045
1. Penguatan stabilitas ekonomi makro daerah melalui pengembangan iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi.	IE 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,61	22,81- 30,24
			2. Pengembangan Pariwisata		
			2.1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,5	6,1
			3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-
			4. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
			4.1 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	-	-
			4.2 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,51	6,33-8,11
			5. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,018	0,10
			6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,8	2,08
			7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,01	62,80
	IE 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-2,27	1,35
	IE 11	Stabilitas Ekonomi Makro	1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,412	5,79
			2. Tingkat Inflasi (%)	2,25-2,90	1,50-2,50
2. peningkatan pemerataan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta perlindungan sosial	IE 1	Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	72,81	75,01
			2. Kesehatan Ibu Dan Anak		
			A. Angka Kematian Ibu (AKB)	12	0
			B. Prevelensi Stunting	18,23	5,67
			3. Penanganan Tuberkolosis		
			A. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Tuberkolosis	65,01	100
			B. Angka Keberhasilan Penanganan Tuberkolosis	92,02	100
			4. Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	95,43	100
	IE 2	Pendidikan Berkualitas Dan Merata	1. Hasil Pembelajaran		
			A. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
			a) Literasi membaca	-	-
			b) Numerasi	-	-
			B. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
			a) Literasi membaca	-	-
			b) Numerasi	-	-
			C. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,8	12
			D. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,7	15
			E. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	6,81	9,4
			F. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	-	-
	IE 3	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	1. Tingkat Kemiskinan (%	6,83	4,25
			2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,16	50,01
			3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	-	-
	IE 4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
			2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,567	0,23
3. peningkatan transformasi digital serta penyediaan infrastruktur, sarana prasarana dasar dan pembangunan perdesaan	IE 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	63,82	85,98
			2. Persentase Desa Mandiri (%)	35,38	87,17
			3. Indeks Infrastruktur	60,33	80,01
	IE 6	Transformasi Digital	1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	-	-
4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing	IE 9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Indeks Reformasi Hukum	47,31	70,00
			2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,85	4,00
			3. Indeks Pelayanan Publik	4	5
			4. Indeks Integritas Nasional	74,43	80,31
	IE 10	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	-	-
			2. Indeks Demokrasi Indonesia	-	-
	IE 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	1. Indeks Daya Saing Daerah	2,95	5,01
5. peningktan kualitas lingkungan hidup yang berketahanan dan resiliensi terhadap bencana	IE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	-	-
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,45	82,88
			3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%	68,45	78,45
			4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,69	40,69
			5. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,33	44,81
	IE 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	455,12	700
			2. Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	-	-
			3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	12,81	10,11
			4. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,84	2,90
			5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	10,23	15,68
	IE 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,84	129,31
			2. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a. Kumulatif	-	-
			b. Tahunan	27,31	80,98

7 PENUTUP

Keberhasilan RPJP Kabupaten Sintang 2025-2045 dalam mewujudkan visi "Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan" perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah;
3. Keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan
4. Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sintang; serta
5. Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana

Untuk layanan informasi dan konsultasi hubungi kami:

Bappeda KabSintang
Bappeda KabSintang
bappeda@sintang.go.id

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2025 - 2045

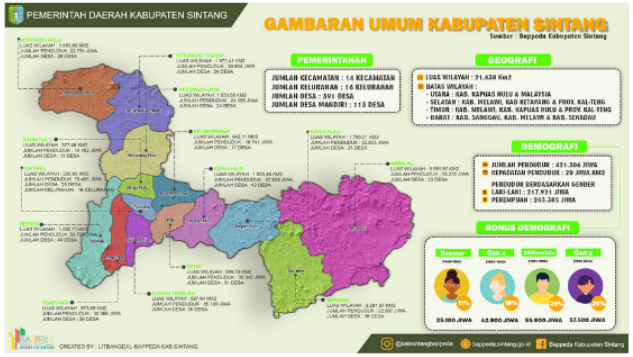


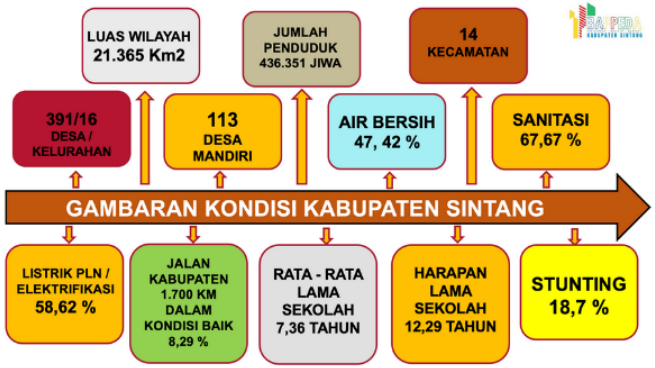
SINTANG EMAS 2045

1 PENDAHULUAN

- Berdasarkan amanah UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib menyusun RPJP Daerah yang mengacu RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan mencakup kurun waktu 20 tahun.
- Keberadaan RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di Kabupaten Sintang.

2 GAMBARAN UMUM DAERAH





3 ISU STRATEGIS



4 VISI DAN MISI

VISI

"KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN."

SASARAN VISI

No	PROVINSI				KABUPATEN SINTANG			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025*	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita	54,48-54,52	350,47-409,86	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita	40,64	86,25
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan* (Bebrp Kab.)	16,51-16,60	45,94-49,33		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	10,76	22,81- 30,24
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia	39,54	385,55				
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,315-0,321	0,253-0,304	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,310	0,238
		Tingkat Kemiskinan	4,8-5,3	0,08-0,33		Tingkat Kemiskinan	8,18	4,44
		Kontribusi PDRB	1,35	1,66				
3	Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3	3,5-4	Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,6	5,1
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	IPM	71,25	80,00	Daya saing sumber daya manusia meningkat	IPM	68,67	80,01
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	69,52	100	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK	25,43	80,98

MISI

1. Menghadirkan Ekonomi Sintang Yang Produktif, Stabil, Inklusif, Mandiri Dan Merata
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia Sintang Yang Bermoral, Unggul, Berdaya Saing Dan Bermartabat
3. Mewujudkan Sintang Yang Terkoneksi Dan Terdigitalisasi Melalui Infrastruktur Yang Handal Dan Menyeluruh
4. Mewujudkan Tata Kelola Yang Adaptif Untuk Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif, Terpercaya, Melayani Dan Kolaboratif
5. Menjaga Ketahanan Ekologi Melalui Pelestarian Alam Dan Ekosistem Lingkungan Yang Berkelanjutan

PENYELARASAN MISI

No	RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD KAB SINTANG 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi
-1	-2	-3	-4
1	Transformasi Indonesia	Transformasi social	Mewujudkan pembangunan manusia Sintang yang bermoral, unggul, berdaya saing dan bermartabat.
2		Transformasi ekonomi	1. Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata 2. Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh
3		Transformasi tata Kelola	Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif
4	Landasan Transfromasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dan ekonomi makro	- Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata - Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	1. Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh 2. Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
8		Kesinambungan Pembangunan	

5 ARAH KEBIJAKAN

1. PERIODE I (2025 - 2029)
PENGUATAN MODAL PEMBANGUNAN

Penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar, pengembangan sumber daya manusia daerah; pengembangankawasan perbatasandengan mendorongpercepatan pembangunanPLBN Sei. Kelik dan saranapenunjangnya; penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari dengan lingkungan

2. PERIODE II (2030 - 2034)
ASELERASI PEMBANGUNAN DAERAH

Difokuskan pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi (percepatan) pembangunan daerah diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan industri berbasis inovasi dan berdaya saing; percepatan peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM, percepatan nilai tambah investasi daerah, percepatan jangkauan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi; percepatan pemanfaatan dan pengendalian ruang, percepatan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; percepatan peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; penguatan penataan rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Provinsi Kapuas Raya, penguatan tata kelola pemerintahan dengan percepatan pemekaran wilayah (Kecamatan dan Desa), implementasi layanan publik, dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

3. PERIODE III (2035 - 2039)
PERLUASAN AKTIVITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perluasan aktivitas pembangunan daerah. Perluasan aktivitas pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar terutama jalan poros kabupaten sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi, penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, Transformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan yang adaptif, ASN yang profesional dan kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, dan masyarakat sipil mandiri dan berbudaya, tata kelola lingkungan hidup selaras, lestari, dan berkelanjutan.